



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Prolegnas prioritas 2026, Baleg sepakati 5 RUU masuk pembahasan
Tanggal : Senin, 20 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Prolegnas Prioritas 2026 Baleg Sepakati 5 RUU Masuk Pembahasan



Bob Hasan

BADAN Legislasi (Baleg) DPR menyepakati revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dengan memasukkan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) tambahan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat evaluasi bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Rabu (15/4/2026).

Dari kelima RUU tersebut, empat merupakan inisiatif DPR. Antara lain, RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Profesi Kurator, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terakhir RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya, satu RUU merupakan usulan Pemerintah, yakni RUU Pelelangan.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan mengatakan, penambahan RUU ke dalam Prolegnas Prioritas 2026 merupakan hasil pembahasan bersama lintas lembaga antara DPR, Pemerintah, dan DPD. Namun, hingga April 2026, belum ada satupun RUU prioritas yang disahkan menjadi undang-undang.

"Total (Prolegnas Prioritas 2026) sebanyak 64 RUU dan 5 RUU kumulatif terbuka yang sedang berproses pembahasannya sekarang ini," ujar Bob Hasan dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Diketahui, prolegnas merupakan instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bob melanjutkan, RUU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya merupakan usul inisiatif Pemerintah kini diubah menjadi usul inisiatif DPR. Baleg juga menyepakati satu RUU usulan Pemerintah untuk dimasukkan dalam prioritas, yakni RUU Pelelangan.

Dalam prosesnya, terjadi perubahan nomenklatur dari sebelumnya Pelelangan Aset menjadi Pelelangan. "Tanpa aset, jadi cukup pelelangan saja," ucap Bob.

Dia menambahkan, evaluasi prolegnas dilakukan untuk menyinkronkan kembali arah legislasi nasional dengan dinamika hukum dan kebutuhan masyarakat. "Penyesuaian ini juga merupakan tindak lanjut dari rapat Baleg dengan pimpinan komisi sebelumnya," kata politikus Gerindra ini.

Sementara, Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mengakui adanya perdebatan sengit dalam rapat evaluasi Prolegnas Prioritas 2026. Dinamika tersebut dinilai sebagai hal wajar dalam proses pengambilan keputusan legislasi.

"Berbeda pendapat, pandangan, dan berdebat sesuatu yang biasa saja dalam kehidupan kita berdemokrasi," kata Doli, di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Sebagai informasi, keributan sempat terjadi ketika pimpinan dan anggota Baleg dari Fraksi Golkar mendesak agar RUU Migas dikeluarkan dari pembahasan pada Rabu (15/4/2026) malam.

Situasi memanas saat Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mempertanyakan status regulasi tersebut di akhir rapat. "Terkait RUU mengenai Migas nanti kita pending dulu saja, apa perlu dicatat?" Tanya Edward kepada seluruh anggota Baleg yang hadir. ■ TIF